

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

a. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah

Madrasah Aliyah Keterampilan Al Irsyad Gajah adalah lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas dalam naungan Kementerian Agama yang dikelola oleh pengurus “Yayasan Islam Al Irsyad Al Mubarak” Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sejak tanggal 10 Januari 1982 yang dirintis oleh DR. H. Abdul Choliq MT, M.Ag. dengan dibantu oleh tokoh masyarakat

Pada awal berdirinya, Madrasah Aliyah swasta dengan status “Terdaftar” berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomer Wk/5.d/90/Pgm/MA/1984 tanggal 17 Januari 1984.

Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah, sekarang telah membuka tiga jurusan yaitu program IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa, dimana dalam perjalanannya telah mengalami lika-liku kehidupan yang bervariasi, diantaranya :

- 1) Tahun 1982-1985 dengan status 100 persen swasta dipimpin oleh Drs. Abdul Choliq MT,
- 2) Tahun 1985-1986 beralih status menjadi MAN Filial dari MAN Semarang, dengan pimpinan Drs. H. Abdul Choliq, guru Kementerian Agama, tetapi pada awal tahun pelajaran 1986/1987 beralih menjadi MAN Filial dari MAN Kendal sampai dengan akhir tahun pelajaran 1991/1992,
- 3) Tahun 1989 dengan status MAN Filial dari MAN Kendal, estafet kepemimpinan beralih kepada Drs. MH. Sholeh Anwar, guru Kementerian Agama,

- 4) Tahun pelajaran 1992/1993, kembali menjadi swasta murni dengan pimpinan Drs. MH. Sholeh Anwar dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Al Irsyad Al Mubarak Gajah dan bulan Pebruari 1993, mengikuti akreditasi dalam rangka menaikkan status “Terdaftar” menjadi “Diakui” dan pada bulan Agustus 1993 status Madrasah Aliyah “Al Irsyad” Gajah, adalah “DIAKUI” dengan SK Menteri Agama nomer B/E/IV/MA/0132/1993 tanggal 21 Agustus 1993 ,
- 5) Tahun 1996-1998 dengan status swasta kepemimpinan beralih kepada Drs. Firdaus Faisal (KMS Kementerian Agama),
- 6) Tahun 1998-2005 dengan status swasta kepemimpinan dipegang oleh Dra. Zulaikhah (KMS Kementerian Agama),
- 7) Tahun 2005-2015 dengan status swasta kepemimpinan dipegang oleh H. Fachrurrozi, S.Pd,
- 8) Mulai bulan Juli 2015 sampai sekarang kepemimpinan dipegang oleh Subekan, S.Ag.,M.H.

MA Keterampilan Al Irsyad Gajah mulai tahun ajaran 2007/2008 sampai sekarang telah membuka tiga jurusan yaitu program IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa, Program Jurusan tersebut diharapkan mampu memenuhi tuntutan zaman yang serasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Saat ini MA Al Irsyad telah mengembangkan program keetrampilan yang meliputi workshop Elektronik, Tata Busana, Teknik Perawatan Sepeda Motor, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Multimedia. MA Al Irsyad juga telah dilengkapi laboratorium baik Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, dan Komputer serta kegiatan ekstrakurikuler dalam menyongsong perkembangan zaman dan teknologi yang maju guna mencetak kader-kader yang ilmiah, amaliah, bertaqwa dan beriman, terampil, siap di masyarakat global.

Yayasan Pendidikan Islam Al Irsyad Al Mubarak sejak tahun 1993 berubah menjadi Yayasan Al Irsyad Al Mubarak Gajah, artinya ke

depan Yayasan ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi mengemban ke sektor sosial keagamaan, ekonomi, maupun pondok pesantren.

Adapun kepengurusan Yayasan Al Irsyad Al Mubarak Gajah sekarang adalah sebagai berikut :



Pelindung	:	Camat Gajah Kepala Desa Gajah
Pembina		
Ketua	:	Dr. H. Abdul Choliq, M.T., M.Ag.
Anggota	:	Solichin
Pengawas		
Ketua	:	H. Fachrurrozi, S.Pd.
Anggota	:	Lukman Hakim, S.H. Mochamad Arief Setyo Utomo
Pengurus		
Ketua Umum	:	H. Moch Japar
Ketua 1	:	Masrukhin
Ketua 2	:	Drs. Munjahid
Sekretaris Umum	:	Jazuli Iksan, S.H.I.
Sekretaris	:	Abdul Aziz, S.T.
Bendahara	:	Khoeron Khasiro Tahta Fikruddin, S.E.

Pada perkembangan selanjutnya, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Yayasan ini sebagaimana visi dan misinya terutama berakhlakul karimah dan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang berhaluan *Ahlussunnah Waljama'ah*.

Lembaga Pendidikan yang dikelola Yayasan Al Irsyad Al Mubarak Gajah meliputi :

- 1) Pondok Pesantren Al Irsyad Al Mubarak Gajah
- 2) Madrasah Diniyah Al Irsyad Gajah Demak
- 3) Madrasah Tsanawiyah Al Irsyad Gajah Demak

4) Madrasah Aliyah Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak

Lokasi : Jl. Raya Gajah-Dempet Nomor 11 Gajah Demak 59581
Telepon : (0291) 4284022.¹

b. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah

MA Nurul Huda Medini Gajah Demak merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas di Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berdiri pada tanggal 13 Juli 1992. MA ini didirikan oleh pengurus Yayasan Nurul Huda Medini yang dipelopori oleh KH. Ahmad Shirodj NH, KH. Cholid Hasyim, Lc, dan Drs. Juanaedi, M. Pd. Madrasah ini resmi berdiri pada tanggal 4 Oktober 1993 yaitu berdasarkan ijin operasional dari Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam dengan nomor wk/5.a/PP.03/23/1993.

Dalam kurun waktu antara tahun 1992 sampai 2011 telah banyak perubahan yang dilakukan dalam segala bidang dan perubahan itu bisa kita lihat dari hasil Akreditasi yang pernah dilakukan yaitu Akreditasi pada Tahun 1995 dengan hasil Terdaftar, yakni berdasarkan SK. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 71/E.IV/PP.03.2.KP/XII/95. Adapun pada tahun 2005 madrasah ini memperoleh Akreditasi dengan skor 423 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/625.21.0/2005.

Hasil Akreditasi tersebut menunjukkan bahwa MA Nurul Huda Medini Gajah Demak mengalami perkembangan dinamis di tengah persaingan antar lembaga walaupun masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak.²

¹ Dokumentasi dari Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah Demak, pada tanggal 2 Mei 2017.

² Dokumentasi dari Madrasah Nurul Huda Medini Gajah Demak, pada tanggal 3 Mei 2017.

c. Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah

MA Tarbiyatul Mubtaddin wilalung telah berdiri 5 tahun yang lalutepatnya pada tahun 2008. Berwrdinya madrasah tersebut atas prakarsa dari para alim ulama' dan para dermawan di desa wilalung, sehingga pada tahun tersebut berdirilah madrasah yang diberi nama MA tarbiyatul mubtadiin wilalung. Tahun pertama sejak berdiri sampai 2012 yayasan tersebut diketuai oleh sosok dermawan desa wilalung. Beliau adalah bapak Munawar, yang oleh para penduduk skitar dan para pengurus yayasan dan para dewan guru dikenal dengan sebutan "mbah nawar". Madrasah tersebut dikepalai oleh bapak Drs. Abdul rozaq, MPd. Pada tahun 2008 sampe sekarang. Hal ini bisa diartikan bahwa madrasah MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung telah memiliki sarana prasarana yang memmadai, tenaga pengajar dengan kualifikasi S1/S2 lebih dari 50 % tenaga pendidiknya sudah tersertifikasi. Dengan demikian tidak diragukan lagi keberadaan MTs Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung dalam ikut serta merta mencerdaskan generasi penerus bangsa yang intelek dan berjiwa islami.

Kepala MA Tarbiyatul Mubtadiin bernama Drs. H. Abdul Rozaq M.Pd yang dahulunya menjadi guru tetap di MTs dan MA Tarbiyatul Mubtadiin. Pada tahun pertama berdirinya MA belum mendapati jumlah siswa yang sekian banyak yakni satu kelas dengan jumlah 20 siswa. Alasan belum mendapatkan murid banyak karena masyarakat masih ragu akan kualitasnya dan masih takut untuk sekolah berjenjang SLTA di luar desanya, sebagaimana desa Ngeluwuk, Krasak dan Sambiroto. Tokoh masyarakat tersebut sangat mengharuskan warganya untuk bersekolah dalam satu yayasan yang sama secara linear, mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA yang berbasis ilmu pengetahuan umum, sedangkan masyarakat pada waktu sangat menginginkan putra-putrinya belajar mengkaji agama. Akhirnya didirikanlah Madrasah Aliyah yang sebagian murid perdananya adalah lulusan dari MTs Tarbiyatul Mubtadiin.

Madrasah ini mengalami tiga kali masa kepemimpinan, yaitu: pada Tahun 2007-2004 dipimpin oleh Abdul Rozaq. Tahun 2014-2015 dimanajeri oleh Noor Wahid dan kembali pada tahun 2015 sampai sekarang digawangi oleh Abdul Rozaq.³

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

a. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah

Berdasarkan hasil observasi peneliti, MA Plus Keterampilan Al Irsyad terletak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di mana letak dari madrasah yang tidak jauh dari keramaian pasar; Pasara Tradisional Gajah semakin menambah suasana *uforia* lingkungan madrasah. Tidak bisa dipungkiri, semangat belajar para peserta didik pun menjadi termotivasi dengan letak madrasah yang cukup strategis ini.

Hasil pengamatan peneliti menemukan bahwasanya madrasah aliyah satu-satunya di desa Gajah ini berbatasan pada sebelah Utara dengan Pasar Tradisional. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boyolali. Sementara sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolo.⁴

b. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah

Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah berada satu atap bersama dengan Masrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medini Gajah. Letak geografis MA yang terletak di desa Medini ini, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mlatiharjo dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babalan Undaan Kudus (Waduk Wilalung).

Adapun batas sebelah Utara yakni Desa Sambung dan batas sebelah Selatan bersinggungan dengan Desa Wilalung. Kondisi madrasah berada pada lingkup geografis pedesaan di mana sebagian

³ Dokumentasi dari Madrasah Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak, pada tanggal 30 April 2017.

⁴ Hasil Observasi peneliti di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak pada tanggal 25 April 2017.

besar peserta didiknya merupakan anak petani padi dengan lahan pertanian menjulang di sekitar pemukiman tempat mereka tinggal. Tekstur tanahnya tergolong liat nan subur, terbukti dengan melimpahnya hasil padi ketika musim panen tiba.⁵

c. Madrasah Aliyah Tarbiyatul Muhtadيين Wilalung Gajah

Di tengah derasnya arus pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan pun meningkat. Pendirian sarana pendidikan yang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman pun tidak dapat dihindarkan. Demikian pula dengan pendirian MA Tarbiyatul Muhtadيين Wilalung Gajah Demak.

Madrasah Aliyah ini secara garis besar pada sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babalan Undaan Kudus. Sebelah Barat bersinggungan dengan Desa Tanjunganyar. Adapun sebelah Utara berbatasan dengan Desa Medini dan sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sidomulyo Dempet.⁶

3. Visi dan Misi Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

a. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah

1) Visi

Terwujudnya kader Islam yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, menguasai *sains* dan teknologi yang berorientasi persaingan global, memiliki kemampuan kewirausahaan dan berperilaku sadar lingkungan.

2) Misi

a) Menyediakan lingkungan yang mendukung terciptanya pembelajaran yang islami;

⁵ Hasil Observasi peneliti di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak pada tanggal 1 Mei 2017.

⁶ Hasil Observasi peneliti di MA Tarbiyatul Muhtadيين Wilalung Gajah Demak pada tanggal 29 April 2017.

- b) Meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan pengembangan potensi diri;
 - c) Meningkatkan layanan informasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik melalui kegiatan peningkatan mutu pembelajaran dan sarana pembelajaran;
 - e) Meningkatkan keterampilan dan apresiasi peserta didik di bidang sains, teknologi, sosial, seni dan budaya melalui *constructive learning* dan pengembangan Gerakan Literasi Madrasah (GLM);
 - f) Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kegiatan pengembangan wawasan khusus usaha yang berbasis pada pengembangan program keterampilan di madrasah;
 - g) Menumbuhkembangkan sikap sadar lingkungan (*darling*) dalam pembelajaran yang berkelanjutan menuju terwujudnya madrasah peduli lingkungan melalui peningkatan kemitraan dengan masyarakat.
- 3) Tujuan
- a) Menciptakan lingkungan madrasah islami yang memiliki ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Menjadikan pondok pesantren sebagai penunjang kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik;
 - c) Meningkatkan prestasi akademik peserta didik dengan memperoleh nilai akademis sekurang-kurangnya 80.00;
 - d) Menciptakan peserta didik yang memiliki *life skill* sebagai bekal hidup dan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
 - e) Meningkatkan keterampilan di berbagai bidang untuk menyiapkan peserta didik di dunia usaha dan dunia industry;
 - f) Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengamalkan keahlian keterampilan yang dikuasai baik sebagai wirausahawan maupun bekerja di dunia usaha/dunia industri;

g) Meningkatkan kepedulian siswa terhadap pelestarian lingkungan dalam proses pembelajaran dan pembiasaan di lingkungan madrasah melalui kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁷

b. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah

Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai lembaga pendidikan menengah berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ingin mewujudkan harapan dan respon dalam:

1) Visi

Visi dari MA Nurul Huda Medini Gajah Kudus yaitu mencetak generasi yang: Terdidik, Terampil dan Berakhlak Qurani.

2) Misi

Misi dari MA Nurul Huda Medini Kudus dijelaskan melalui beberapa poin di bawah ini:

- a) Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal dengan memiliki nilai UN diatas standar nasional;
- b) Melaksanakan pembelajaran ekstra kurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat;
- c) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam dan budaya bangsa sehingga menjadi kearifan dalam bertindak.

⁷ *Opcit*, dokumentasi MA Al Irsyad Gajah Demak.

3) Tujuan

Berdasarkan visi dan misi madrasah maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a) Memperoleh nilai UN diatas standar nasional;
- b) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan yang variatif, inovatif dan bermakna;
- c) Mengembangkan kedisiplinan dari seluruh komponen madrasah untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan kokoh sebagai dasar dalam aktifitas;
- d) Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas siswa melalui pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
- e) Membekali 100% siswa mampu membaca dan menulis al-Qur'an.⁸

4) Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah

Visi MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak ada tiga, yaitu: "Terwujudnya Generasi yang Islami, Berprestasi, Terampil dalam Teknologi, Bertanggungjawab dan Cinta Tanah Air"⁹

Indikator Visi:

- 1) Terwujudnya generasi yang berprestasi dalam akademik dan non akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri;
- 2) Terwujudnya generasi yang mampu menguasai dan menerapkan teknologi sebagai bahan kajian dan atau hidup mandiri;
- 3) Terwujudnya generasi yang bertanggungjawab, santun dalam bertutur dan berperilaku;
- 4) Terwujudnya generasi yang setia dan mencintai serta mempertahankan NKRI.

Adapun misi yang dijalankan oleh MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak adalah:

⁸ *Opcit*, Dokumentasi MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.

⁹ *Opcit*, Dokumentasi MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak.

- 1) Menciptakan generasi yang beriman bertaqwa, populis dan islami;
- 2) Menciptakan generasi yang berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan terampil teknologi;
- 3) Mewujudkan pembentukan karakter dan perilaku yang Islami serta mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat;
- 4) Melatih warga madrasah untuk aktif, kreatif, efektif, hidup mandiri dan cinta tanah air;
- 5) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.¹⁰

4. Profil Guru, Karyawan, Peserta Didik, dan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

a. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak

1) Profil Guru

Tenaga pendidik di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak pada Tahun Pelajaran 2016/2017 terdiri dari 36 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah empat orang, Guru Tetap sebanyak 23 orang, dan Guru Tida Tetap sebanyak Sembilan orang. Berdasarkan gender, guru laki-laki di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak sebanyak 16 orang serta guru perempuan mencapai 20 orang.¹¹

2) Profil Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak terdiri dari beberapa kualifikasi yakni, tenaga administrasi, tenaga *cleaning service*, dan Penjaga Madrasah. Adapun rincian jumlah dari ketiganya yakni, tenaga administrasi sejumlah Sembilan orang, tenaga *cleaning service* satu orang, dan penjaga madrasah satu prang. Sehingga total tenaga kependidikan di

¹⁰ *Opcit*, Dokumentasi MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak.

¹¹ *Opcit*, Dokumentasi MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak.

MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak mencapai 11 orang yang kesemuanya merupakan karyawan tidak tetap.¹²

3) Profil Peserta Didik

Pada Tahun Ajaran 2016/2017 keadaan peserta didik di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak secara kuantitas berjumlah 488 anak dengan rincian 116 laki-laki dan 372 perempuan. Terdapat 15 rombongan belajar dengan jurusan Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa. Kelas 10 terdiri dari lima kelas; dua kelas Ilmu Alam, dua kelas Ilmu Sosial, dan satu kelas Jurusan Bahasa. Kelas sebelas, terdiri dari lima kelas, dengan dua kelas Ilmu Alam, dua kelas Ilmu Sosial, dan satu kelas Jurusan Bahasa. Demikian halnya dengan kelas 12.¹³

4) Profil Sarana dan Prasarana

a) Keadaan Tanah

MA Keterampilan Al Irsyad Gajah diselenggarakan dalam lokasi:

Jalan Raya Gajah-Dempet Nomor 11 Gajah, Demak

Luas Tanah : 3500 m²

Status tanah : Hak guna bangunan

b) Keadaan bangunan permanen berlantai 3 (tiga).¹⁴

b. Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah Demak

1) Profil Pendidik

Jumlah tenaga pendidik di MA berjumlah 21 orang. Hal ini dibedakan pembagiannya dalam tiga pembeda. Pertama, dari segi gender, jumlah tenaga pendidik di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sejumlah tujuh orang. Kedua, berdasarkan jenis kepegawaiannya, tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) satu orang, Guru Tetap Yayasan (GTY) sejumlah 14 orang, dan Guru Tidak Tetap (GTT) sejumlah tiga orang. Ketiga,

¹² *Ibid*, Dokumentasi MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak.

¹³ *Ibid*, Dokumentasi MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak.

¹⁴ *Ibid*, Dokumentasi MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak.

berdasarkan pendidika terakhirnya, untuk lulusan Strata 2 sebanyak satu orang, lulusan Strata 1 sejumlah 18 orang, lulusan Diploma 3 sebanyak satu orang, dan lulusan SLTA/Pondok Pesanteren sejumlah empat orang.¹⁵

2) Profil Peserta Didik

Peserta didik MA Nurul Huda Medini Gajah Demak pada tahun ajaran 2016/2017 keseluruhan berjumlah 184 anak. Dengan rincian 69 peserta didik laiki-laki dan 115 peserta didik perempuan. Kelas X pada MA Nurul Huda Medini Gajah Demak memiliki peserta didik sejumlah 60 anak, kelas XI 68 anak, dan kelas XII sejumlah 56 anak. Keadaan peserta didik MA Nurul Huda Medini Gajah Demak berdasarkan asal pendidikan, memiliki kauntitas lulusan SMP sejumlah 26 anak dan MTs berjumlah 132. Ternyata lulusan MTs mendominasi asal pendidikan di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak dengan mayoritas berasal dari lulusan MTs Nurul Huda Medini Gajah Demak.¹⁶

3) Profil Sarana Prasarana

a) Tanah dan Bangunan

(i) Jumlah tanah yang dimiliki 1.150 M²

(ii) Luas Bangunan seluruhnya 350 M²

b) Ruang dan Gedung

Ruang dan gedung yang ada di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak memiliki total jumlah sebanyak 17 ruangan. Ruang kelas merupakan jenis ruangan yang mendominasi dengan jumlah sebanyak 7 buah disusul kamar mandi guru dan siswa sejumlah masing-masing dua ruang. Kemudian masing-masing berjumlah satu ruang yakni ruang Kepala Madrasah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Perpustakaan, Ruang Keterampilan, dan Ruang OSIS. Adapun rata-rata keadaan ruang dalam kondisi baik tetapi kurang

¹⁵ *Op cit*, Dokumentasi MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.

¹⁶ *Ibid*. Dokumentasi MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.

dalam segi finishing serta kebutuhan ruangan yang masing kurang pengadaannya.¹⁷

c) Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak terdiri dari meja dan kursi, papan tulis, alat peraga, perlengkapan laboratorium bahasa, perlengkapan laboratorium komputer, buku kurikulum, buku-buku penunjang (umum, agama, dan lainnya) dan televisi.¹⁸

c. Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah

1) Profil Pendidik dan Organisasi Madrasah

MA Tarbiyatul Mubtadiin mengangkat seorang kepala madrasah yang secara administratif bertugas sebagai penyelenggara kegiatan dan usaha sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Bersamaan dengan itu diangkat pula beberapa ahli yang khusus mengelola pendidikan dan pengajaran di MA Tarbiyatul Mubtadiin yang semuanya meliputi:

Jumlah guru yang mengajar di MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak 31 orang ditambah dengan 1 orang tenaga administrasi. Guru dan tenaga administrasi ini adalah laki-laki dan perempuan karena mengingat siswa-siswinya juga laki-laki dan perempuan.¹⁹

2) Profil Peserta Didik

Jumlah keseluruhan dari peserta didik di MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak adalah sebanyak 205 anak. Adapun rincian dari jumlah tersebut yakni sebanyak 87 peserta didik laki-laki dan 118 peserta didik perempuan. Jumlah itu juga terbagi dalam enam rombongan belajar yakni kelas X dua ruang, kelas XI IPA dua ruang, dan kelas XII IPA juga sebanyak dua ruang.²⁰

¹⁷ *Ibid.* Dokumentasi MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.

¹⁸ *Ibid.* Dokumentasi MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.

¹⁹ *Op cit.* Dokumentasi MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak.

²⁰ *Ibid.* Dokumentasi MA Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak.

3) Profil Saran Prasarana

MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ada di dalamnya. Di antara sarana dan prasarana itu adalah gedung-gedung dan ruangan yang dibangun di atas tanah madrasah yang luas keseluruhannya adalah 2.000 meter persegi dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya.

Beberapa sarana dan prasarana MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah diantaranya,

- a) Gedung kelas yang representatif;
- b) Laboratorium IPA;
- c) Laboratorium komputer dengan standar mutu nasional;
- d) Perpustakaan;
- e) Gedung pertemuan (auditorium);
- f) Sarana olahraga;
- g) Sarana ketrampilan.²¹

5. Formulasi Program Keluarga Harapan ((PKH) Kementerian Sosial dalam Memberdayakan Pendidika Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Tahun 2017

Program Keluarga Harapan (PKH) besutan Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2PA) merupakan program nasional yang dibiayai oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dijelaskan oleh Ali Mustamar, Pendamping PKH Kecamatan Gajah disela-sela kesibukannya dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana dia mendampingi empat desa dalam lingkup Kecamatan Gajah, yakni Desa Medini, Desa Tlogopadogan, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono. Selain Ali Mustamar peneliti juga mewawancarai Muhammad Kusnadi yang juga merupakan petugas pendamping PKH.

²¹ *Ibid*, Dokumentasi MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak.

Menurut Mustamar, PKH merupakan program yang mengindik pada Kementerian Sosial yang sudah ada sejak Tahun 2007 silam akan tetapi di Demak sendiri mulai terwujud pada sekitar Tahun 2012 begitu pula di Kecamatan Gajah.

“PKH ini sudah ada sejak Tahun 2007 di Indonesia, akan tetapi untuk Kabupaten Demak sendiri baru dimulai sejak Tahun 2012.” Mustamar mengatakan.²²

Masih menurut Mustamar, PKH sendiri ternyata bukanlah program inisiatif murni dari pemerintah, akan tetapi merupakan bentuk lain dari program serupa yang di dunia Internasional dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT). Hal inilah yang membedakan PKH dengan bantuan-bantuan social lain yang minim akan pertanggungjawaban.

“Jadi PKH ini di istilah internasional dikenal dengan CCT (*Conditional Cash Transfer*), dimana mereka mendapatkan bantuan akan tetapi dengan pengkondisian tertentu. Lah inilah yang membedakan PKH dengan bantuan sosial lainnya. Akan tetapi seiring perjalanan regulasi PKH, sekarang mulai di Tahun 2016, bantuan yang diterima KPM bukan lagi bantuan tunai tetapi non tunai.”²³

Lebih lanjut Mustamar menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga komponen utama dalam PKH yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.

“Ada tiga komponen utama dari PKH yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendidikan yakni meliputi anak usia sekolah; SD, SDMP, SMA dan sederajat. Kesehatan meliputi ibu hamil dan balita. Serta kesejahteraan sosial yang meliputi orang lanjut usia (lansia) dan penyandang cacat/*disablitas* berat.”²⁴

Ditanya tentang dasar hukum PKH, Muastamar menjelaskan bahwa ada beberapa landasan yang mendasari pembentukan program PKH yakni Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir

²² Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tangga; 15 April 2017 di Kantor PKH Kecamatan Gajah.

²³ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

²⁴ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

Miskin, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH):

“Ada beberapa dasar hukum PKH, diantaranya Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).”²⁵

Kesejahteraan sosial merupakan komponen baru yang mulai dicanangkan sejak Tahun 2016. Mustamar mengatakan bahwa sebelum 2016 tidak ada komponen kesejahteraan social dalam PKH.

“Dahulu hanya ada komponen pendidikan dan kesehatan saja, kemudian pada Tahun 2016 ditambahlah komponen baru yakni kesejahteraan sosial.”²⁶

Lebih lanjut Mustamar menjelaskan bahwa regulasi yang ada dalam PKH khususnya pada bidang pendidikan yakni mengarah pada kesadaran para penerima bantuan akan pentingnya pendidikan anak-anak mereka.

“Begini, dalam bidang pendidikan, syarat yang harus dipenuhi KPM ketika mereka menerima bantuan ini adalah mereka harus memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Kami; pendamping PKH akan memeriksa absensi anak-anak mereka rutin tiga bulan sekali ke sekolah/madrasah mereka. Ketika ditemukan ada peserta

²⁵ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

²⁶ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

didik penerima bantuan PKH yang absensinya kurang dari 85 %, maka bantuan mereka akan ditangguhkan. Dan saldo di rekeningnya adalah nol.²⁷

Tetapi hal ini akan berbanding terbalik apabila pada tiga bulan setelahnya absensi mereka lebih dari 85 persen, bantuan mereka akan ditangguhkan sampai pada pembayaran bantuan tahap berikutnya. Sebagaimana ucap Mustamar:

“Akan tetapi, ketika ditemukan pada tiga bulan berikutnya ketika kita mengecek absensi mereka kembali dan didapati kehadiran mereka di sekolah lebih dari 85%, maka bantuan yang tadinya ditangguhkan pada tahap sebelumnya, akan diberikan dobel pada tahap tersebut.”²⁸

Muhammad Kusnadi menambahi, bahwasanya ada beberapa regulasi yang merupakan aturan baru yang dimulai sejak Tahun 2017 ini dan seterusnya.

“Sebelum Tahun 2017, ketika komitmen mereka terhadap kehadiran di sekolah kurang dari 85 % bantuan mereka akan dikurangi sebesar 10 %.”²⁹

Terkait berapa bantuan yang diterima, ada perbedaan mencolok di Tahun 2017 ini. Hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan penerima bantuan. Terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok dalam hal ini sebagaimana dipaparkan Kusnadi:

“Sebelum Tahun 2017, bantuan kepada KPM dibedakan sesuai komponen masing-masing. Anak usia SD mendapat bantuan Rp. 450.000,00, usia SMP Rp. 750.000,00, usia SMA Rp. 1.000.000,-. Adapun untuk ibu hamil dan anak balita sebesar Rp. 1.200.000,00. Bantuan itu diberikan empat tahap dalam setahun atau tiga bulan sekali. Bantuan ini belum termasuk bantuan tetap sebesar Rp. 500.000,00 yang mereka terima setahun sekali, biasanya pada tahap pertama Akan tetapi di Tahun 2017 ini, semua KPM mendapat bantuan seragam/flat; yakni sebesar Rp. 500.000,00 untuk tiga tahap pertama, dan Rp. 390.000,00 untuk tahap keempat sehingga totalnya adalah Rp. 1.890.000,00. Hal ini berlaku untuk semua komponen kecuali kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan Rp.

²⁷ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tanggal; 16 April 2017 di Kantor PKH Kecamatan Gajah.

²⁹ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusnadi.

2.000.000,00 per tahunnya dengan rincian Rp. 500.000,00 selama empat tahap.”³⁰

Menurut Mustamar KPM menerima bantuan sedikitnya empat kali dalam setahun, yakni setiap tiga bulan sekali.

“Bantuan akan ditransfer ke rekening masing-masing KPM selama empat tahap dalam satu tahun atau tiga bulan sekali.”³¹

Perubahan ini menimbulkan pro kontra diantara KPM. Mereka ada yang langsung menyukuri perubahan ini, tetapi banyak pula yang menyayangkannya karena bantuan yang mereka terima berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

“Pro kontra pasti ada terkait perubahan regulasi nominal bantuan ini. Akan tetapi secara keseluruhan mereka bisa menerimanya dengan lapang dada.”³²

Melalui regulasi baru ini, Mustamar mengatakan, secara otomatis bagi mereka yang mempunyai komponen terbanyak dalam keluarganya dengan yang hanya memiliki satu komponen saja, bantuan yang diterima akan sama.

“Hal ini berarti bagi KPM yang punya tiga kategori komponen dalam satu keluarga dan KPM yang hanya punya satu komponen saja, nilai bantuan akan sama.”³³

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana regulasi PKH dari awal mereka diundang untuk divalidasi hingga sampai ke tahap pencairan bantuan. Mustamar mengatakan setiap calon penerima PKH harus mendapatkan SUPA.

“Lengkapnya begini; ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon KPM untuk menerima hak sebagai peserta PKH. Pertama kali mereka menerima Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) untuk dilakukan proses validasi apakah di dalam keluarga mereka terdapat komponen PKH di dalamnya. Pertemuan awal ini biasanya dilakukan di Balai Desa masing-masing dengan meminta bantuan Perangkat Desa untuk menyampaikan undangan tersebut kepada

³⁰ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

³¹ *Ibid*. Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

³² *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusnadi.

³³ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

calon KPM. Apabila setelah divalidasi di dalam keluarga mereka terdapat komponen PKH misalnya anak sekolah atau lansia, maka mereka berhak menjadi peserta PKH untuk kemudian mendapat bantuan sosial non tunai. Tahap berikutnya yakni pemutakhiran data. Pemutakhiran data merupakan tahap dimana pendamping melakukan aktualisasi data kembali karena perubahan kategori komponen atau perubahan data komponen; misalnya yang tadinya hamil menjadi melahirkan, yang tadinya SD menjadi SMP, atau yang dulunya SMA kelas sepuluh naik tingkat ke kelas sebelas.” Mustamar semakin serius menambahkan.³⁴

Setelah itu menurut Ali Mustamar tahap verifikasi menjadi tahapan berikutnya.

“Selanjutnya masuk ke tahapan verifikasi yang merupakan bentuk evaluasi pendamping terhadap konsekuensi komitmen pertanggung jawaban KPM terhadap bantuannya. Verifikasi ini meliputi dua hal yakni verifikasi pendidikan dan kesehatan. Melalui verdik, kita mengecek absensi mereka selama tiga bulan di sekolah masing-masing. Jika ditemukan alasan ijin atau alfa sebanyak 85 % maka KPM tersebut mendapat penalti tidak akan menerima bantuan pada tahap tersebut.” Mustamar tetap setia menjelaskan. Selanjutnya verifikasi pendidikan; yakni pengecekan tingkat kehadiran ibu hamil ataupun balita dalam memeriksakan kesehatan mereka secara rutin dan berkala pada fasilitas kesehatan yang terdekat dengan mereka. Jika mereka tidak komit menjalankannya, melalui data dari Bidan Desa, bantuan merekapun akan ditangguhkan.”³⁵

Setelah verifikasi selesai, menurut Mustamar, tahap berikutnya yakni penyerahan bantuan non tunai melalui Kartu ATM masing-masing. Kartu ATM ini bisa dicairkan di seluruh mesin ATM se Indonesia

“Beda dengan sebelum tahun 2016 dimana bantuan akan secara langsung diserahkan kepada KPM melalui Kantor Pos terdekat, pada Tahun 2016 bantuan diberikan melalui transfer ke rekening-rekening pribadi KPM yang dapat dengan mudah dicairkan pada mesin-mesin ATM di seluruh Indonesia.”³⁶

PKH secara lengkap memiliki beberapa siklus diantaranya fase perencanaan, fase awal, fase lanjutan, dan fase strategi transformasi. Keempat siklus ini membagi regulasi PKH ke dalam beberapa fase yang

³⁴ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

³⁵ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

³⁶ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

memungkinkan terjadinya sinergitas diantara beberapa fase yang ada. Seperti yang dikatakan Kusnadi:

“Dalam PKH ada empat fase yang dimulai dari tahap awal sampai akhir PKH. Diantaranya pertama, fase perencanaan yang meliputi penetapan sasaran, rekrutmen SDM, rakor, dan diklat. Kedua, fase awal yang meliputi pertemuan awal, validasi, dan pembayaran bantuan pertama. Ketiga, fase lanjutan yang terdiri dari kegiatan verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan pembayaran bantuan selanjutnya. Keempat, fase strategi transformasi yang meliputi resertifikasi, graduasi, dan transisi.”³⁷

Ke depan, bantuan yang mereka terima bisa dicairkan bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan bisa berbentuk bahan pokok. Mustamar mengatakan bahwa e-warong merupakan program Kementerian Sosial untuk menyediakan bantuan non tunai kepada KPM.

“Ke depannya melalui e-warong KPM bisa dengan leluasa memilih, akan diambil tunai uangnya ataupun dibelanjakan di e-warong yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga relatif terjangkau.”³⁸

Ketika ditanya apa e-warong itu, Mustamar menimpali merupakan kios bahan pokok yang berfungsi selain sebagai tempat penarikan tunai uang bantuan KPM, juga menerima pembelian barang pokok dari KPM menggunakan kartu yang sudah mereka miliki.

“E-Warong merupakan kependekan dari elektronik warung gotong royong yang dikelola KPM didampingi pendamping PKH berupa kios bahan pokok yang berfungsi selain sebagai tempat penarikan tunai uang bantuan KPM, juga menerima pembelian barang pokok dari KPM menggunakan kartu yang sudah mereka miliki. Jadi tinggal gesek, mereka bisa membeli barang di e-warong.”³⁹

Kembali kepada tema awal PKH dan pemberdayaan pendidikan Islam, kali ini Muhammad Kusnadi yang juga pendamping PKH menjelaskan:

“Tentang pemberdayaan pendidikan Islam khususnya bagi anak KPM yang bersekolah di Madrasah Aliyah, setiap pertemuan

³⁷ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusnadi.

³⁸ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

³⁹ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

kelompok bulanan, kami selalu berpesan pada ibu-ibu mereka bahwasanya absensi dan kesadaran pendidikan harus ditingkatkan. Selain mereka akan dirugikan ketika bantuan mereka ditunda, prestasi anak-anak mereka juga harus menjadi perhatian. Jadi sedikit banyak kita turut serta dalam pemberdayaan pendidikan Islam melalui PKH.”⁴⁰

Kusnadi juga membenarkan seluruh hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Ali Mustamar. Hal ini membuktikan bahwa secara triangulasi sumber sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Ditanya mengenai respon pengurus KPM ketika diarahkan untuk memiliki kesadaran terhadap pendidikan, mayoritas dari mereka menyambut baik permintaan tersebut. Mustamar mengatakan mereka cukup positif menyambut arahan tersebut.

“Mereka menyambut positif arahan tersebut. Selain mereka khawatir terhadap bantuan mereka yang ditangguhkan, mereka juga mempunyai kesadaran niat dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka.”⁴¹

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal ini bahwa ada kaitan antara pemberdayaan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah dengan pemberian bantuan PKH menurut Mustamar ada hubungan ya antara pemberian bantuan PKH dengan pemberdayaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah ini. Dengan pemberian bantuan dan regulasi yang melekat di dalamnya KPM cenderung membuka mata terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam.

“Saya kira ada hubungan ya antara pemberian bantuan PKH dengan pemberdayaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah ini. Dengan pemberian bantuan dan regulasi yang melekat di dalamnya KPM cenderung membuka mata terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Hal inilah yang menjadi embrio pemberdayaan pendidikan Islam yang dimaksud.”⁴²

⁴⁰ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusnadi..

⁴¹ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

⁴² *Ibid*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

6. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dalam Memberdayakan Pendidikan Islam di MA Kecamatan Gajah

Peran madrasah sedikit banyak menentukan kesuksesannya tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial yang sekarang bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) menjadi Dinsos P2PA menjadikan PKH sebagai program andalan; *masterpiece* nya dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Program PKH yang memfokuskan diri pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi akar dari kesuksesan Kementerian Sosial dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (*Tupoksi*) nya.

Kaitannya dengan fokus pendidikan, sekolah/madrasah memiliki peran sentral dalam mendorong tindakan sadar pendidikan bagi peserta didik, khususnya yang mendapatkan bantuan sosial PKH melalui dukungan orang tua mereka. Terkait dengan lokus penelitian ini, dimana mengambil obyek penelitian pada Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, peneliti mengadakan wawancara dengan obyek-obyek penelitian meliputi tiga Madrasah Aliyah yakni Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak, Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah, Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah.

Bersumber dari wawancara kami dengan beberapa narasumber dari ketiga madrasah tersebut, meliputi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Guru Bimbingan Konseling (BK), Wali kelas, dan peserta didik penerima program bantuan sosial PKH, diperoleh beberapa hal terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberdayakan pendidikan Islam pada madrasah yang bersangkutan selama tahun penelitian berjalan.

Terkait implementasi ini, Ammah Habibah, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak memberikan beberapa keterangan. Ketika dimintai pendapatnya tentang bantuan sosial PKH secara umum. Menurutnya, bantuan PKH merupakan

program yang bisa juga bertujuan untuk memfasilitasi prestasi belajarnya di madrasah.

“PKH merupakan kependekan dari Program Keluarga Harapan dimana program tersebut digunakan untuk memfasilitasi prestasi belajar siswa, khususnya bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya dan nantinya akan mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁴³

Masruroh, Guru PAI dan Wali kelas di MA Tarbiyatul Muhtadiin menambahkan tentang pengertian PKH ini. Menurutnya, PKH ini diharapkan dapat mengubah hidup pesertanya.

“PKH itu menurut saya sebuah program pemerintah yang diharapkan dapat mengubah kehidupan penerimanya dari yang kurang layak menjadi berkehidupan yang layak.”⁴⁴

Ketika ditanya tentang apakah bantuan PKH ini diterima oleh semua siswa, ternyata tidak. Ammah menjelaskan bahwa hanya beberapa siswa saja yang mendapatkan bantuan tersebut sesuai keputusan dari Kementerian Sosial melalui data keluarga yang masuk dalam *list* Kemensos.

“Tidak semua siswa mendapatkannya, itu berdasarkan kuota yang didapat tiap daerah”⁴⁵

Hal tersebut diamini oleh Abdullah Muchib, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MA Tarbiyatul Muhtadin Wilalung Gajah Demak bahwa tidak semua siswa mendapat bantuan ini.

“Hanya puluhan saja siswa di sini yang mendapat bantuan PKH”⁴⁶

Ammah menambahkan bahwasanya selain bantuan PKH, dimungkinkan bahwa peserta didik yang mendapat PKH bisa juga mendapat bantuan lainnya tapi menurutnya prioritas bantuan cukup satu saja.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab, Guru Mata Pelajaran PAI (Akidah Akhlak) di MA Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak, tanggal 2 Mei 2017.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Masruroh, Guru PAI (Qur'an Hadits) sekaligus Wali Kelas XII IPS di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak, pada tanggal 3 Mei 2017.

⁴⁵ *Op cit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Muchib, Guru PAI Mapel Qur'an Hadits dan SKI di MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak pada tanggal 30 April 2017.

“Mereka bisa mendapat bantuan lainnya, asalkan sumber bantuan itu sendiri beda. Tapi ada yang dapat juga ada yang tidak, tapi kelihatannya cenderung cukup satu saja yang mereka dapatkan.”⁴⁷

Muchib menambahkan bahwa sebagian peserta didik penerima PKH juga mendapatkan bantuan lainnya seperti KIP dan BSM.

“Ada beberapa anak yang mendapat PKH juga mendapat bantuan lain, seperti KIP dan BSM.”⁴⁸

Masruroh, yang juga Guru Al Qur'an Hadits MA Nurul Huda Medini Gajah Demak juga mengiyakan Ammah. Selain mendapat bantuan PKH peserta didik penerima PKH juga dinominasikan mendapat bantuan sosial pendidikan lainnya.

“PKH menjadi dasar bagi kami untuk memberikan bentuk bantuan lain kepada peserta didik.”⁴⁹

Masruroh yang juga merupakan wali kelas XII MA Nurul Huda Medini Gajah Kudus ini sangat mengapresiasi peserta didiknya yang mendapatkan bantuan PKH. Dia menganggap bahwa mereka bisa menjadi contoh teladan bagi kawan-kawan mereka karena tingkat kehadiran, prestasi dan akhlak budi pekertinya.

“Mereka ditekankan untuk lebih rajin bersekolah karena jika tidak bantuan yang diterima orang tua mereka akan dikurangi.”⁵⁰

Terkait absensi peserta didik penerima PKH mayoritas sudah bagus, hal ini dikemukakan oleh Dewi Fatimah, guru Bimbingan Konseling MA Al Irsyad Gajah Demak. Dia menambahkan bahwa kebetulan keseluruhan peserta didik penerima PKH di MA Al Irsyad adalah anak-anak yang cenderung aktif dalam belajar.

“Mayoritas kehadirannya sudah bagus. Kesemuanya kebetulan adalah anak-anak yang aktif.”⁵¹

⁴⁷ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁴⁸ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Abdullah Muchib.

⁴⁹ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁵⁰ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁵¹ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Dewi Fatimah.

Terkait prestasi akademik, Masruroh mengemukakan bahwa prestasi yang diraih siswa peserta PKH secara garis besar memiliki prestasi bagus.

“Prestasi dari mereka ada juga yang meraih peringkat baik di kelasnya, ada yang di tengah-tengah, tapi ada juga sedikit yang di bawah. Tapi rata-rata; mayoritas mereka memiliki prestasi yang baik.”⁵²

Hal ini dikuatkan oleh Ammah, bahwa sebagian penerima PKH di madrasahnyanya memiliki prestasi akademik yang sudah baik.

“Semuanya sudah baik, mayoritas. Tapi mungkin ada satu dua yang masih kurang. Tapi mayoritas sudah baik.”⁵³

Sikap dari peserta didik penerima PKH juga menjadi catatan, masih Masruroh, dia mengatakan bahwa sikap mereka baik karena kesadaran mereka terhadap konsekuensi bantuan yang mereka terima.

“Bantuan yang mereka terima akan berimbang pada konsekuensi terhadap akhlak dan budi pekerti luhur.”⁵⁴

Ammah menambahi dari PKH juga bisa menjadi motivasi bagi anak yang awalnya indiscipliner menjadi lebih disiplin lagi.

“Ketika mendapat PKH mereka mendapat motivasi dan mereka juga menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Hal ini bisa mengarahkan mereka dari indiscipliner menjadi lebih disiplin. Karena kalau tidak kepesertaan mereka akan dipertimbangkan lagi.”⁵⁵

Langkah yang dilakukan ketika ditemukan peserta didik PKH dari madrasah kurang baik dari segi kedisiplinan dan prestasi menurut Masruroh guru BK pertama kali menasehati dan ditegur.

“Dari sekolah akan menasihati dan ditegur, kalau kamu tidak pernah berangkat sekolah nanti yang rugi kamu sendiri karena bantuan yang orang tua terima akan berkurang.”⁵⁶

⁵² *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁵³ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁵⁴ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁵⁵ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁵⁶ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Masruroh.

Ammah juga menambahkan bahwa motivasi akan terus menerus dilakukan dalam hal ini.

“Kita terus memotivasi dan memberikan bimbingan khusus. Dan mereka juga bisa mengikuti karena kita sudah memiliki kultur madrasah yang baik. Kalau yang lainnya bisa kenapa mereka tidak.”⁵⁷

Tambahan dari Fatimah, madrasah juga akan melakukan home visit, jika diketemukan masalah indiscipliner yang sifatnya sudah kronis.

“Kami akan melakukan home visit.”⁵⁸

Ketika ditanya adakah perubahan perilaku akibat dari pemberian bantuan PKH dimaksud, Masruroh mengatakan bahwa

“Perubahan tingkah laku pasti ada, hal ini karena bantuan ini digunakan untuk membayar sekolahnya.”⁵⁹

Mengenai penggunaan dana yang diterima apakah sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya Masruroh menjawab:

“Sebenarnya *fifty-fifty*, tergantung kesadaran orang tuanya. Tetapi dari administrasi pembayaran uang kegiatan sekolah pada dasarnya mereka tidak ada yang menunggak terlalu lama.”⁶⁰

Poin terpenting ketiga disinggung terkait apakah PKH berperan terhadap pemberdayaan pendidikan Islam di madrasah, Masruroh menanggapi, pasti ada karena agama Islam mengajarkan adanya tolong menolong dalam kebaikan.

“Dalam Islam sendiri menganjurkan adanya saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini dimungkinkah pemerintah menginginkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui program ini dan mereka bisa memenuhi pendidikan yang tinggi.”⁶¹

Ammah juga menganggap adanya peran yang dimaksud. Dia menambahkan:

⁵⁷ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁵⁸ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Dewi Fatimah.

⁵⁹ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁶⁰ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Masruroh.

⁶¹ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Masruroh.

“Jelas berpengaruh sekali karena ikut membantu terutama untuk anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan keislamannya. Kalau tidak dibantu mungkin nanti banyak yang *drop out*.”⁶²

Wawancara terhadap peserta didik, dilakukan kepada beberapa siswa di ketiga Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Ternyata mereka sedikit banyak mengetahui tentang PKH.

“PKH adalah Program Keluarga Harapan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.” Jelas Khalimatus Sadiyah, peserta didik kelas 11 IPA di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak.⁶³

Lain lagi dengan Siti Masruroh, siswa kelas 11 IPA MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak. Dia mengatakan bahwa PKH merupakan program pemerintah dalam menciptakan keluarga yang lebih sejahtera.

“PKH adalah program untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.”⁶⁴

Mereka juga sebagian ada yang mengetahui jumlah nominal bantuan yang didapatkan. Khalimah mengatakan nominal bantuan yang mereka terima sebesar lima ratus ribu rupiah; berkala setiap tahunnya.

“Bantuannya sebesar lima ratus ribu yang diterima tiga atau empat kali dalam setahun.”⁶⁵

Ketika dikonfirmasi apakah ada bantuan lain yang mereka terima selain PKH, bervariasi, ada yang mendapatkan ada pula yang tidak. Akan tetapi Karim tidak mendapat bantuan apapun selain PKH.

“Kalau saya tidak dapat BSM dan KIP.”⁶⁶

⁶² *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ammah Habibab.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Khalimatus Sa'diyah, siswa kelas 11 MA NU Nurul Huda Medini Gajah Demak, di ruang kelas IPA 2 pada tanggal 30 April 2017.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Siti Masruroh, siswa kelas 11 MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak.

⁶⁵ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Khalimatus Sadiyah.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Miftahul Karim, siswa kelas 10 MA Nurul Huda Medini Gajah Kudus.

Siti lain lagi dia mendapatkan bantuan lain yaitu KIP dan BSM.

“Saya mendapatkan KIP dan BSM.”⁶⁷

Tentang absensi selama di madrasah, mereka mengaku disiplin dalam hal ini. Begitu juga ketika disodori nama-nama peserta PKH yang lain, dengan kompak mereka menjawab baik.

“Saya dalam bulan ini berangkat terus, juga tidak pernah terlambat datang ke sekolah.”⁶⁸

Mengenai prestasi, Karim menjawab bahwa prestasi mereka berada di level rata-rata.

“Prestasi kita biasa-biasa saja, di tengah-tengah.”⁶⁹

Ditanya tentang tanggung jawab mereka dalam belajar di sekolah, ternyata sedikit banyak ibu mereka juga mewanti-wanti untuk rajin ke sekolah sebagaimana orang tua Karim.

“Kita bertanggungjawab, karena ibu di rumah juga menekankan dalam hal ini.”⁷⁰

Hal ini diamini Naili Izza, siswa kelas 10 MA Tarbiyatul Muhtadin Wilung Gajah Demak. Dia merasa ada tanggungan mental dan rasa tanggungjawab terhadap bantuan PKH ini.

“Pastinya kita akan bertanggungjawab terhadap bantuan ini.”⁷¹

Ketika ditanya tentang manfaat PKH mereka menjawab bisa meringankan beban keluarga, khususnya biaya sekolah mereka.

“Bisa meringankan beban, beli buku, bayar iuran sekolah.”⁷²

Suril Ikhwan, siswa MA kelas 11 di MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilung Gajah Demak mengamini hal ini. Menurutnya beban orang tua juga akan semakin ringan dalam hal ini.

⁶⁷ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Siti Masruroh.

⁶⁸ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Siti Masruroh.

⁶⁹ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Miftahul Karim.

⁷⁰ *Ibid.* Hasil Wawancara dengan Miftahul Karim.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Naili Izza, siswa kelas 10 MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilung Gajah Demak.

⁷² *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Khalimatus Sadiyah.

“Bisa meringankan beban orang tua.”⁷³

Ditanya tentang peruntukan PKH apakah digunakan untuk keperluan sekolah, mereka kompak menjawab iya. Demikian pula dengan Karim yang mengiyakannya.

“Iya, kita menggunakannya untuk keperluan sekolah.”⁷⁴

Izza menambahkan keperluan yang dimaksud di atas contohnya yaitu untuk membayar uang kegiatan madrasah.

“Bantuannya untuk keperluan sekolah, misalnya bayar SPP.”⁷⁵

7. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial daam Memberdayakan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017

Evaluasi merupakan salah satu elemen manajemen strategik yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan suatu usaha/program mengingat begitu sentralnya peran evaluasi dalam menentukan tindakan lebih lanjut terhadap konsekuensi yang telah dijalankan.

Evalusi merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas apa yang telah mereka kerjakan. Biasanya evaluasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan ketika mereka akan menginjang pada sebuah jenjang lanjutan yang memiliki strata yang lebih tinggi maupun lebih terhormat. Sebagaimana dengan evaluasi yang dilakukan dalam meninjau program pemerintah; PKH ini. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk menjembatani para keluarga penerima bantuan untuk meraih harapan mereka, yakni mencapai derajat sejahtera. Ini dilakukan dengan mediasi bantuan uang yang mereka terima setiap triwulan sekali, dengan harapan uang tersebut dapat bermanfaat dalam pemberdayaan pendidikan dan kesehatan keluarga, menuju keluarga yang sejahtera.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Suril Ikhwan, siswa kelas 11 MA Tarbiyatul Muhtadiin Wilalung Gajah Demak.

⁷⁴ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Miftahul Karim.

⁷⁵ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Naili Izza.

Ditanya mengenai evaluasi yang dilakukan terhadap bantuan PKH ini, Mustamar menimpali bahwasanya evaluasi PKH dilakukan dengan melakukan verifikasi baik pendidikan maupun kesehatan melalui fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan selama tiga bulan sekali. Selain hal tersebut juga terdapat evaluasi kepesertaan yang dilakukan selama sesi pertemuan kelompok setiap bulannya.

“Ya itu tadi, evaluasinya dalam bentuk komit tidaknya mereka dalam kegiatan pendidikan di sekolah, maupun kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan keluarga mereka. Ini berada dalam regulasi verifikasi yang dilaksanakan tiga bulan sekali tadi. Selain itu evaluasi tentang kepesertaan juga perlu, apakah dia masih layak menjadi peserta PKH atau tidak”⁷⁶

Lebih lanjut Mustamar menjelaskan, apabila dalam tiga tahap mereka selalu non komit, bentuk evaluasi yang diberikan yakni mereka dikeluarkan sebagai anggota/peserta PKH. Non komit dalam hal ini yakni tidak mengisi absensi dalam satu bulan minimal 85 persen.

“Tiga tahap tidak komit, KPM langsung dikeluarkan sebagai anggota PKH. Hal ini untuk pelajaran bagi segenap peserta agar komitmen terhadap PKH, pendidikan dan kesehatan harus dilakukan dengan tertib dan penuh kesadaran.”⁷⁷

Setiap triwulan sekali dalam rangka melakukan evaluasi tentang pertanggungjawaban peserta didik yang keluarganya menerima PKH, Mustamar selaku pendamping melakukan kunjungan ke sekolah/madrasah untuk mengecek absensi mereka dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini akan menentukan ketersediaan bantuan mereka pada tahap berikutnya.

“Kami meninjau ke sekolah dalam tiga bulan sekali itu dan apabila dalam tiga bulan tersebut ada absensi yang kurang dari 85 persen maka bantuan mereka akan ditangguhkan sampai pada tahap berikutnya.”⁷⁸

Selain evaluasi terstruktur melalui kegiatan verifikasi pendidikan yang dilakukan setiap triwulan, adapula verifikasi kepesertaan yang

⁷⁶ *Opcit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

⁷⁷ *Ibid*. Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

⁷⁸ *Ibid*. Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

dilakukan sepanjang waktu sesuai dengan kondisi keluarga yang bersangkutan. Jika dinilai sudah layak dan tidak lagi masuk dalam kategori miskin, peserta tersebut akan digraduasi untuk selanjutnya sudah masuk dalam kategori keluarga sejahtera.

“Verifikasi kepesertaan dilakukan kapanpun, jika dinilai mereka sudah kaya dan tidak lagi miskin, maka mereka digraduasi dan tidak memperoleh bantuan PKH lagi.” tambah Kusnadi.⁷⁹

Disinggung mengenai evaluasi PKH yang dilakukan di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Tahun 2017, berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, secara keseluruhan komitmen mereka terhadap PKH perlu diacungi jempol. Hanya terdapat satu dua saja yang tidak memiliki komitmen dalam hal ini. Hal ini menjadi suatu keberhasilan tersendiri dalam pelaksanaan program PKH dimana sesuai tujuan yang dicanangkan, program ini berhasil memberikan nilai kesadaran peserta didik dan keluarganya akan arti penting pendidikan bagi masa depan mereka.

“Secara keseluruhan komitmen mereka bagus, jarang sekali ditemukan absensi yang bolong dari mereka. Paling-paling satu dua anak yang masih perlu dibina. Hal ini menunjukkan hal yang positif dan kesadaran mereka terhadap pendidikan meningkat. Evaluasi dalam hal ini sudah menunjukkan hal yang positif.”⁸⁰

B. Pembahasan

1. Formulasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dalam Memberdayakan Pendidikan Islam di MA Kecamatan Gajah Tahun 2017

PKH; Program Keluarga Harapan, tidak bisa dipungkiri memberikan manfaat bagi keluarga yang menerima bantuan sejumlah uang tersebut; yang dikenal dengan KPM; Keluarga Penerima Manfaat. Sebagaimana tujuan besar dari program ini yakni mengentaskan kemiskinan, diharapkan dalam jangka panjang, angka kemiskinan akan sedikit demi sedikit dikurangi. Tujuan lain yakni meningkatkan kesadaran

⁷⁹ *Op cit*, Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusnadi.

⁸⁰ *Op cit*, Hasil Wawancara dengan Ali Mustamar.

masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga sehingga tercapailah cita-cita Indonesia cerdas dan sehat.

PKH erat kaitannya kesejahteraan sosial. Allah SWT. berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”⁸¹

Perintah untuk bekerja pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun juga berfaedah bagi orang lain. Hubungan sosial antar sesama sangat terasa dalam hubungan pekerjaan. Dengan hasil pekerjaan yang dia peroleh mereka juga dapat menggunakannya untuk membantu sesama. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dengan manusia lainnya. Ada hubungan sinergitas antara manusia satu dengan lainnya. Inilah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena selain dibekali nafsu, dia juga dibekali sifat kemalaikatan yang tunduk pada perintah Allah SWT, termasuk peduli terhadap sesama.

PKH digadang-gadang oleh pemerintah dalam jajaran Kabinet Kerja, khususnya Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Anak ini menjadi andalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang harus mereka taati. Jadi ibarat makanan, PKH tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan ketika masyarakat mendapatkan jatah bantuan sosial ini.

Berbeda dengan bantuan-bantuan sosial terdahulu misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sejahtera Mandiri (BLSM) yang hanya memberikan manfaat jangka pendek yang bersifat hanya

⁸¹ *Opcit*, Depag, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.

sementara dan sekali habis. Artinya, setelah mendapatkan bantuan uang tunai dengan nominal sekian ratus ribu, tidak ada kewajiban yang harus mereka lakukan. Tidak ada pengawasan bagi mereka untuk apa bantuan itu mereka gunakan. Apakah sudah tepat guna?

Hal ini sangat berbeda dengan PKH, bantuan ini diberikan secara berkala kepada penerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Bantuan yang di dunia internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini cukup teruji ampuh dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Lebih lanjut tentang PKH, program ini mewajibkan pesertanya untuk mematuhi beberapa kewajiban selama mereka *dibaiat* menjadi peserta.

Dasar hukum PKH sendiri meliputi beberapa Undang-Undang yakni Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).⁸²

Ada beberapa kewajiban yang setidaknya dijalankan peserta PKH dalam kepesertaanya, diantaranya; meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, meningkatkan kesadaran akan kesehatan keluarga, dan mengikuti pertemuan kelompok.

a. Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan

Setiap peserta PKH dengan komponen pendidikan di dalamnya, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/ sederajat dituntut untuk meningkatkan kualitas

⁸² *Opcit*, www.keluargaharapan.com/landasanhukum.

pendidikan keluarga dimulai dengan prosentase kehadiran di sekolah yang harus mencapai 85 persen setiap bulannya. Dengan tingginya tuntutan angka kehadiran di sekolah ini diharapkan partisipasi mereka dalam belajar akan meningkat dan akhirnya berdampak positif terhadap prestasi akademi mereka di sekolah menuju cita-cita mulia mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang;

b. Kesadaran Pemeriksaan Kesehatan Keluarga

Kematian ibu hamil dan melahirkan menjadi masalah serius wanita-wanita Indonesia dalam meraih kesempurnaan mereka sebagai kaum hawa. Melalui komponen kesehatan ibu hamil dan balita peserta PKH diharuskan secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan calon bayi, bayi, maupun balita mereka minimal sebulan sekali. Fasilitas kesehatan gratis bisa dimanfaatkan peserta PKH untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka. Diharapkan melalui program ini, angka kematian ibu hamil dan melahirkan dapat ditekan seminimal mungkin dengan fasilitas kesehatan yang profesional dan berkualitas.

c. Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok dilakukan setiap bulan dengan rutin, bergilir di setiap kediaman peserta PKH. Setiap pertemuan akan didampingi oleh pendamping PKH yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan mengarahkan mereka jika terdapat permasalahan ke-PKH-an yang tidak bisa dipecahkan. Yang terpenting, pendamping harus berusaha mengubah pola hidup peserta PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan KPM.

Baru-baru ini, pertemuan kelompok; dimulai pada Tahun 2017, diisi sepenuhnya dengan *Family Development Session* (FDS) atau dalam istilah Indonesianya disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarag (P2K2). Dalam P2K2 ini pendamping menyampaikan beberapa sesi materi terkait dengan penyuluhan keluarga seperti; bagaimana menjadi orang tua yang baik, memahami perilaku anak, hingga materi tentang orang lanjut usia (lansia).

Melalui P2K2 ini tentu saja unsur pendidikan didalamnya sangat kental sekali, pendamping diposisikan sebagai seorang tutor/guru yang mendampingi KPM dalam memahami materi yang disampaikan. Terkait dengan keislaman, materi yang disampaikan pada dasarnya juga menyangkut beberapa hal terkait dengan Al Qur'an dan Hadits, misalnya materi tentang memahami perilaku anak, dimana dijelaskan bahwa anak adalah ibarat kertas putih dan orang tuanya lah yang dapat mempengaruhi apakah kertas tersebut terjaga tetap putih ataupun akan ternoda.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua ibu-bapaknyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi”.

Pemberdayaan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pun menjadi bergeliat dengan adanya program pemerintah; PKH ini. Civitas akademika Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah pun seakan mendapatkan angin segar melalui formulasi PKH yang digulirkan oleh pemerintah dalam mendukung tumbuhkembangnya pemberdayaan pendidikan Islam dalam madrasah mereka.

Siklus PKH terdiri dari beberapa fase dimana fase-fase tersebut berisi dasar pendirian PKH sampai dalam tahapan graduasi/kelulusan KPM dalam PKH. Siklus dalam fase-fase itu terbagi dalam empat bagian, diantaranya:

a. Fase Perencanaan

Fase dalam siklus PKH ini merupakan awal mula pendirian PKH dan penetapan keluarga penerima PKH yang selanjutnya disebut KPM; Keluarga Penerima Manfaat (dulu KSM/Keluarga Sangat Miskin). Dalam fase perencanaan terdapat beberapa kegiatan diantaranya penetapan sasaran, rekrutmen SDM, Rapat Koordinasi (Rakor), dan Pendidikan dan Latihan (Diklat).

Penetapan sasaran merupakan ketentuan bagaimana kriteria penentuan keluarga yang berhak menerima bantuan. Poin-poin apa yang harus dipenuhi suatu keluarga untuk mendapatkan bantuan ini menjadi inti dari poin ini. Rekrutmen SDM, merupakan usaha yang dilakukan decision maker PKH dalam mendampingi KPM dan mengakses serta mengoperasionalkan data tentang KPM. Rekrutmen ini meliputi seleksi penerimaan pendamping PKH dan operator PKH.

Rapat Koordinasi merupakan rapat gabungan antara petugas pelaksana PKH dengan Kementerian Sosial guna audiensi, pemaparan, hingga penentuan solusi terkait masalah ke-PKH-an. Pendidikan dan Latihan merupakan usaha peningkatan SDM pendamping dan operator sebagai bekal mereka dalam pendampingan di lapangan

b. Fase Awal

Fase awal merupakan fase berikutnya dari siklus PKH setelah perencanaan yang berisi beberapa kegiatan, diantaranya pertemuan awal, validasi, dan pembayaran bantuan pertama. Pertemuan awal merupakan fase paling awal sebuah keluarga menerima bantuan PKH untuk kemudian dilakukan validasi terhadap kategori anggota keluarga mereka. Validasi sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk menyinkronkan antara data yang sudah ada dengan data lapangan. Dalam validasi, bisa saja terjadi sebuah keluarga tidak masuk dalam kepersertaan PKH karena kategori yang ditentukan tidak dapat ditemukan dalam anggota keluarga mereka.

Penyaluran bantuan pertama tidak perlu dilakukan verifikasi. Ini merupakan penyaluran khusus yang hanya dilakukan penerima pada awal masa kepesertaan dan hanya sekali terjadi.

c. Fase Lanjutan

Fase lanjutan meliputi beberapa kegiatan, diantaranya verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan pembayaran bantuan selanjutnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan

pendamping secara berkala. Verifikasi dilakukan tiga bulan sekali. Pemitakhiran dilakukan sebelum verifikasi. Serta penyaluran bantuan selanjutnya juga dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ketiga kegiatan ini akan peneliti kupas pada sub bab di bawah secara lebih detail.

d. Fase Strategi Transformasi

Fase terakhir dari siklus PKH merupakan fase di mana keluarga penerima bantuan PKH sudah diambang kelulusan mereka. Ada masa pemberlakuan keluarga PKH dalam menerima bantuan dimaksud. Masa waktu yang miliki yakni lima tahun ditambah masa transisi selama tiga tahun. Tapi info terbaru masa transisi hanya dua tahap atau setengah tahun. Masa transisi merupakan masa penentuan peserta apakah mereka masih layak menerima bantuan apakah sudah sejahtera dari segi ekonomi. Jika keluarga tersebut dinilai belum sejahtera dan masih layak menerima bantuan, maka mereka berhak mendapatkan kembali bantuan selama masa transisi.

Berbeda ketika mereka dinilai sudah sejahtera dan sudah tidak berhak menerima bantuan maka status keanggotaan PKH mereka dalam fase graduasi. Mereka dianggap sudah berhasil lulus menjadi anggota PKH sehingga tidak perlu lagi diberi bantuan selama masa transisi.

Beberapa regulasi yang menjadi formula dari PKH dalam mencapai tujuan pemberdayaan pendidikan Islam diantaranya; validasi, pemitakhiran data, verifikasi, dan penyaluran bantuan. Keempat kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pendamping kecuali validasi yang dilakukan sekali dalam kepesertaan KPM.

a. Validasi Awal

Skema awal calon peserta PKH untuk menjadi peserta tetap dan memperoleh predikat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM); calon penerima bantuan akan memperoleh Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA). Melalui undangan tersebut,

calon KPM akan dikumpulkan di balai desa setempat untuk kemudian divalidasi kepesertaannya. Perlu diketahui, yang menerima undangan tersebut adalah pengurus rumah tangga, yakni ibu, bukan ayah. Jadi wanitalah yang selanjutnya menjadi penerima bantuan PKH karena tugas kepengurusan rumah tangganya dinilai lebih fleksibel dibanding dengan sang ayah; kepala rumah tangga.

PKH Pusat akan mendistribusikan SUPA melalui surat elektronik untuk kemudian dicetak oleh Operator PKH Kabupaten untuk dibagikan oleh Pendamping PKH Kecamatan. Dalam pendistribusian undangan pertemuan awal ke pihak penerima, Pendamping PKH Kecamatan bekerjasama dengan perangkat Desa setempat. Sebagaimana diketahui, bahwasanya pejabat Desa setempatlah yang lebih paham mana-mana warganya, terkait alamat, dan kemungkinan identitas ganda (nama) sehingga human eror; kesalahan pendistribusian undangan, salah alamat, bisa diminimalisir.

Memanfaatkan domisili Kantor PKH Kecamatan yang berada di lingkungan Kecamatan, dalam kasus ini yakni Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, melalui rapat koordinasi perangkat Desa dengan staff kecamatan setiap hari senin setelah apel pagi, pendamping PKH Kecamatan Gajah memanfaatkannya dengan melakukan sosialisasi SUPA sekaligus kulonuwun; meminta izin bahwa warganya akan dinominasikan mendapat bantuan sosial dari PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pertemuan awal calon penerima bantuan PKH dilakukan untuk melakukan validasi; apakah mereka benar-benar termasuk dari kategori keluarga yang menerima manfaat program ini. Melalui wawancara terbatas, pendamping melakukan penelusuran singkat tentang riwayat dari anggota keluarga mereka. Apakah ada diantara anggota keluarga yang termasuk

dari kategori komponen PKH yang meliputi: ibu hamil, balita, anak usia sekolah, orang tua lanjut usia (umur di atas 70 Tahun), dan penyandang cacat (*disabilitas*) berat.

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi regulasi dalam hal ini, yakni komponen tidak lebih dari tiga anggota keluarga, anak putus sekolah tidak termasuk dalam komponen yang dimaksud, usia orang tua lanjut usia sekurang-kurangnya adalah 70 tahun, dan penyandang cacat yang dimaksud adalah cacat berat bawaan dari lahir yang oleh kecacatannya tersebut yang bersangkutan tidak bisa sendiri melakukan aktifitas kesehariannya; memerlukan bantuan anggota keluarga yang lain.

Sesudah calon KPM memenuhi beberapa persyaratan komponen yang diajukan, mereka berhak menjadi penerima manfaat PKH dan mendapatkan haknya, berupa bantuan sejumlah uang yang waktunya akan ditentukan lebih lanjut (menyusul). Sebelum penutupan semua sesi pertemuan ini, ditunjuk seorang dari KPM yang mempunyai kontak person, sebagai ketua kelompok yang nantinya bertanggung jawab akan informasi yang disampaikan pendamping kepada KPM sehingga waktu yang diperlukan untuk penyampaian informasi akan lebih singkat dan efisien.

Validasi hanya dilakukan sekali terhadap KPM selama kepesertaannya. Berbeda dengan tahapan PKH lainnya seperti pemutakhiran data, verifikasi dan pencairan lanjutan yang dilakukan secara berkala terhadap KPM PKH.

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan bagian terpenting dari formulasi PKH yang menyangkut komitmen KPM dalam mempertanggungjawabkan bantuan yang mereka terima. Pertanggungjawaban yang harus mereka lakukan merupakan konsekuensi dari bantuan yang mereka terima, sehingga mereka

memiliki *mainset* bahwasanya bantuan yang mereka terima adalah buah dari usah mereka dalam berkomitmen terhadap program ini.

Inilah yang membedakan PKH dengan program bantuan sosial lain yang cenderung mengabaikan unsur komitmen dalam mempergunakan bantuan mereka. PKH didesain untuk mengubah pola pikir mereka terhadap kelaziman pemberian bantuan yang cenderung *membodohi*, karena mereka diposisikan sebagai orang yang menengadahkan tangannya untuk menerima belas kasih dari pemerintah yang dalam hal ini diposisikan sebagai seorang dermawan.

Peserta PKH bukanlah *peminta-minta* yang hanya berbekal wajah *ngenes* untuk mendapatkan sejumlah uang. Peserta PKH/KPM adalah sekumpulan orang yang diberdayakan untuk terentaskan dari kemiskinan dan mempunyai pola pikir yang lebih maju dalam pemahaman tentang arti penting pendidikan dan kesehatan dalam keluarga mereka.

Lebih lanjut tentang kegiatan verifikasi ini akan disampaikan pada sub pembahasan yang ketiga yakni tentang evaluasi PKH dalam memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah; mengingat verifikasi erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi yang menjadi syarat mutlak keberlanjutan mereka dalam menjadi peserta PKH pada tahap-tahap penerimaan bantuan berikutnya.

Verifikasi dalam PKH meliputi dua hal yakni verifikasi pendidikan dan verifikasi kesehatan. Melalui kegiatan verifikasi inilah komitmen KPM dapat dipantau. Pendamping akan melakukan kunjungan terhadap fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) KPM untuk memeriksa komitmen mereka terhadap kegiatan pendidikan anak sekolah mereka dan pemeriksaan kesehatan bagi kehamilan dan balita mereka. Jika

ditemukan tidak komitmen, maka bantuan yang mereka terima akan ditangguhkan untuk diberikan ke tahap berikutnya jika pada tahap berikutnya tersebut mereka beritikad baik dengan berkomitmen terhadap kesadaran terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga.

Verifikasi khususnya verifikasi pendidikan dilakukan di setiap sekolah/madrasah setiap tiga bulan sekali. Madrasah Aliyah yang berada di lingkup Kecamatan Gajah pun tak ketinggalan untuk dilakukan verifikasi. Ketiga Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah ini diverifikasi sehingga nantinya ditemukan tentang tingkat kehadiran peserta didik yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemberdayaan pendidikan Islam pada fasilitas pendidikan Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah pada Tahun 2017 ini.

c. Pemutakhiran Data

Formulasi selanjutnya yakni tahapan pemutakhiran data KPM. Tidak bisa dipungkiri, seiring berjalannya waktu, perubahan menjadi hukum alam. Setiap perubahan memerlukan konsekuensi sehingga perubahan itu tidak menimbulkan gejolak, akan tetapi menghasilkan sebuah sinergi. Perubahan data KPM peserta PKH sendiri memuat beberapa hal, diantaranya kehamilan, kelahiran, kepindahan fasdik/faskes, kenaikan tingkat/kelas fasdik, dan pergantian pengurus PKH karena pengurus sebelumnya sakit/merantau/meninggal.

Pemutakhiran data ini dilakukan oleh pendamping setiap saat sebelum kegiatan verifikasi dilakukan. Pelaksanaan *update* data ini dilakukan melalui operator kabupaten di kantor PKH Kabupaten. Melalui pemutakhiran ini, diharapkan data yang dimiliki akan semakin actual dan mempermudah sesi verifikasi baik verifikasi pendidikan maupun verifikasi kesehatan.

Pemutakhiran sendiri, terutama terkait data pendidikan anak peserta PKH dilakukan pada pertemuan kelompok atau melalui kontak pribadi KPM dengan pendamping dengan melampirkan kelengkapan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari sekolah/madrasah, dan kutipan Buku Ibu dan Anak sebagai bukti aktualisasi pemutakhiran mereka.

d. Penyaluran Bantuan

Bantuan yang diterima dalam PKH ini dibedakan menjadi dua macam; yakni pembayaran bantuan pertama dan pembayaran bantuan selanjutnya. Pembayaran bantuan pertama, masuk dalam fase awal di siklus PKH. Sedangkan pembayaran bantuan selanjutnya masuk dalam fase lanjutan siklus PKH. Perbedaan lainnya, pembayaran pertama, tanpa melalui proses verifikasi komitmen dan hanya berpegang pada data dalam pertemuan awal dan validasi. Sedangkan pembayaran bantuan selanjutnya sudah melalui tahapan verifikasi komitmen baik berupa verifikasi kesehatan di fasilitas kesehatan maupun verifikasi pendidikan di fasilitas pendidikan masing-masing.

Bantuan yang diterima program ini merupakan permasalahan vital yang sangat dinantikan oleh KPM. Oleh karena itu, kehati-hatian perlu dilakukan sehingga uang bantuan nantinya akan sampai ke tangan KPM dengan selamat tanpa permasalahan-permasalahan yang dapat mengecewakan KPM. Adapun besaran bantuan yang diterima KPM besarnya berbeda dari tahun sebelum 2017 dan tahun 2017 ini, berikut perbandingannya:

Tabel 4. 1
Perbandingan Jumlah Bantuan PKH
dari tahun sebelum 2017 dan tahun 2017

Komponen PKH	Besaran Bantuan Per Tahun (Rp)	
	Sebelum 2017	2017
Ibu Hamil	1.200.000,00	1.890.000,00
Balita	1.200.000,00	
Anak SD	450.000,00	
Anak SMP	750.000,00	
Anak SMA	1.000.000,00	
Orangtua Lansia	-	2.000.000,00
Disabilitas Berat	-	

Jumlah bantuan sebelum tahun 2017 berdasarkan komponen dalam satu keluarga dengan maksimal tiga komponen pada setiap keluarga. Adapun pada tahun 2017, jumlah bantuan disamaratakan diantara setiap kategori yakni sebesar Rp. 1.890.000,00 per tahun untuk semua KPM kecuali lansia dan disabilitas berat yang nilai bantuannya mencapai Rp. 2.000.000,00 setiap tahunnya.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dalam Memberdayakan Pendidikan Islam di MA Kecamatan Gajah Tahun 2017

Madrasah Aliyah yang *notabene* adalah pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ragam permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena tingkatan ini merupakan tingkatan sekolah tertinggi sebelum melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian yang menarik jika mereka dijadikan subyek karena masa peralihan mereka menuju dewasa mempunyai proses yang penuh dinamika sehinggal layak untuk disimak.

Sebagaimana uraian panjang lebar yang telah dibahas tentang PKH; Program Keluarga Harapan, terdapat satu poin penting yang harus menjadi perhatian bahwasanya PKH merupakan sebuah program bantuan sejumlah

uang dari pemerintah kepada mereka yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi rendah dan masih mempunyai tanggungan anggota keluarga yang hamil, balita, bersekolah, lansia, dan memiliki cacat tubuh berat permanen sejak lahir. Akan tetapi program ini sebenarnya bukan berorientasi pada materi; uang secara membabi buta. Uang bukanlah segalanya. Tidak layak kiranya kita mendewakan uang sebagai raja diraja, menganggap setiap detik kita adalah bernilai rupiah; *time is money*. Sebuah pemikiran kurang bijak yang matrealistik.

PKH pada dasarnya adalah strategi pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan arti penting pendidikan dan kesehatan. Setali tiga uang, melalui program ini juga angka kemiskinan bisa secara signifikan ditekan. Uang yang digelontorkan merupakan sarana investasi dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Sebuah usaha kemanusiaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengedukasinya.

Coba bandingkan dengan program bantuan sosial non berkelanjutan; sekali habis, yang dicanangkan pemerintah sebelumnya. Bantuan cuma-cuma tanpa konsekuensi yang realistis. Bantuan-bantuan ini cenderung *membodohi* karena penggelontoran trilyunan uang kepada masyarakat miskin tanpa pertanggungjawaban, untuk apa mereka memanfaatkannya. Melalui PKH, masyarakat diharapkan lebih cerdas dan sadar, bahwasanya tidak ada yang serba cuma-cuma. Semuanya harus ditebus dengan tanggung jawab sehingga *mainset* mereka tentang kemiskinan dapat berubah dan mereka tidak lagi menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Mereka menginginkan duduk terhormat tanpa berharap belas kasihan orang. Inilah yang menjadi tujuan sejati. Menjadikan mental bangsa Indonesia sekuat baja. Mengadakan revolusi mental yang berimplikasi pada pola hidup mereka. Menuju Indonesia sejahtera, lahir dan batin.

Pelaksanaan PKH sudah menuju tahun ke- 10 di seluruh Indonesia, dan tahun ke- 5 di Kabupaten Demak. Atau dengan kata lain PKH dimulai

di Indonesi pada Tahun 2007 dan 2012 di Kbupaten Demak. Selama itu dengan superior program PKH dipertahankan dari masa ke masa dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo sekarang. Bahkan di rezim Jokowi; begitu Presiden Joko Widodo biasa disebut, PKH menjadi program unggulan Kementerian Sosial RI yang digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Tiap tahun jumlah kepesertaan PKH ditambah dengan pada tahun 2018 direncanakan ada penambahan penerima bantuan PKH baru sebanyak enam juta keluarga.

Kedigdayaan PKH bukan hanya terpantau dari penurunan rasio kemiskinan belaka, di lain pihak, PKH ternyata bisa meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Betul sekali, PKH melalui program kesadaran pendidikan dengan peningkatan partisipasi belajar di sekolah/madrasah tidak bisa dipungkiri bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

Pun di Madrasah Aliyah khususnya yang bermarkas di lingkup Kecamatan Gajah; MA Plus Keterampilan Al Irsyad, MA Nurul Huda, dan MA Tarbiyatul Mubtadiin. Ketiga MA di Kecamatan Gajah tersebut terbukti telah memberdayakan pendidikan Islam dengan baik. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran peserta didik penerima bantuan PKH khususnya pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI), telah menjadikan pemerdayaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah dimaksud dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Jumlah anak didik peserta PKH dari tiap sekolah berbeda-beda. Untuk tingkat Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah sendiri jumlahnya beraneka ragam dengan rincian Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak sebanyak 77 siswa, Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah sebanyak 51 siswa, dan Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Gajah Demak sebanyak 52 siswa. (Rincian data siswa penerima PKH MA se Kecamatan Gajah terlampir).

PKH mulai aktif di MA se Kecamatan Gajah dimulai pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan pertama kali Kabupaten Demak disinggahi PKH. Selama lima tahun terakhir terjadi setidaknya dua kali penambahan kepesertaan; KPM yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Pemberdayaan pendidikan Islam dengan indikator prestasi akademik di mapel PAI dan pembentukan karakter peserta didik penerima bantuan PKH dengan kesalihan akhlak dan budi pekerti menjadikan PKH sukses menjadikan peserta didik penerimanya di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah diberdayakan keislamannya.

Bahkan peserta didik penerima PKH cenderung dijadikan sebagai sampel siswa teladan bagi siswa lainnya. Hal ini terindikasi karena kesadaran akan kedisiplinan, prestasi dan akhlak mereka yang terpuji, sehingga guru bisa menjadikan mereka sebagai teladan yang baik bagi teman-teman mereka untuk lebih disiplin, berprestasi, dan memiliki akhlak yang terpuji sehingga nantinya akan mendapatkan bantuan PKH yang dimaksud.

Sinergitas antara madrasah, penerima PKH dan pendamping sudah selanyaknya ditingkatkan untuk memperkuat program andalan pemerintah ini. Diharapkan mainset peserta didik terhadap bantuan yang mereka terima sedikit banyak dapat berubah, dari sebelumnya mereka menganggap bahwa bantuan tersebut dapat digunakan sesuka hati, berubah menjadi kesadaran mereka dalam memanfaatkan bantuan untuk meringankan biaya pendidikan. Demikian juga dengan kewajiban setelah menerima bantuan. Mereka dintuntut untuk memiliki konsep bahwa bantuan ini bukanlah bantuan Cuma-Cuma, melainkan bantuan bersyarat yakni dengan syarat pasrtisipasi aktif mereka dalam pembelajaran di madrasah.

Selanjutnya beban moral bahwa mereka merupakan peserta didik terpilih dari sekian banyak peserta didik yang belum mendapat PKH diharapkan akhlak budi pekerti mereka akan luhur karena beban mental yang mereka pikul.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dalam Memberdayakan Pendidikan Islam di MA Kecamatan Gajah Tahun 2017

Segala macam kegiatan harus dikontrol dengan pengawasan yang berkala sehingga tujuan yang hendak dicapai akan segera terwujud. Tanpa pengawasan, suatu kegiatan tidak akan membuahkan hasil dan berimplikasi pada kegagalan program dimaksud. Pengawasan layaknya penyeimbang kegiatan dimana *reward and punishment*; penghargaan dan konsekuensi hukuman diperlukan untuk menjamin kondusifitas suatu kegiatan.

Pun dalam kegiatan PKH Kementerian Sosial RI ini, kegiatan evaluasi sudah selayaknya dilakukan untuk keberlangsungan dan kelanjutan program ke depannya. PKH yang erat kaitannya dengan nominal rupiah, memerlukan pengawasan ekstra hati-hati mengingat uang adalah kebutuhan materi paling sensitif. Orang-orang cenderung akan berusaha keras untuk mendapatkan materi bernama uang. Oleh karena itu, ketika ditemukan dalam PKH ini kelemahan kontrol sedikit saja, kekhawatiran terjadinya gejolak tidak dapat dielakkan.

Pemberdayaan Islam juga demikian, sistem kontrol hendaknya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang tuntutan syariah yang harus mereka jalankan. Pada tingkatan awal, bisa dimaklumi ketika mereka setidaknya melakukan syariah karena ketakutan mereka terhadap pedihnya azab dan siksa neraka. Hal ini bisa dimaklumi karena tingkat pemahaman mereka belum sampai pada tataran takwa yang hakiki. Barulah ketika mereka sudah mengetahui Islam secara hakiki, tuntutan bukan menjadi ketakutan tetapi berubah menjadi kebutuhan. Kebutuhan akan beribadah kepada *Sang Khaliq*. Kebutuhan akan menaati perintah dan menjauhi larangannya.

Tingkatan Madrasah Aliyah sendiri rata-rata masih kurang bisa menempatkan Islam hakiki dalam penghambaan mereka. Proses ini perlu dihargai. Mereka butuh kepercayaan sehingga ke depan tingkatan beribadah karena kebutuhan akan menjadi slogan dalam hidup mereka. Kecamatan

Gajah sendiri merupakan distrik yang cukup religius karena tidak bisa dipungkiri wilayah geografisnya yang berada dalam pusaran dua setidaknya tiga waliyullah; Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria.

Evaluasi PKH dalam ini bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yakni verifikasi komponen dan verifikasi kepesertaan.

a. Verifikasi Komponen

Verifikasi komponen merupakan suatu bentuk pengevaluasian komitmen peserta PKH atas tanggung jawab bantuan yang mereka terima setiap triwulan. Verifikasi ini secara umum bertujuan untuk memberikan penghargaan ataupun peringatan kepada KPM yang berkomitmen dan sebaliknya. Verifikasi ini dibedakan menjadi dua, verifikasi pendidikan dan verifikasi kesehatan.

1) Verifikasi Pendidikan

Berdasarkan tema yang diangkat yakni tentang pemberdayaan pendidikan Islam, verifikasi pendidikan ini menjadi fokus dalam pembahasan tentang evaluasi program PKH ini. Verifikasi dilakukan dalam rentan waktu tiga bulan sekali. Setelah pemutakhiran data selesai, data hasil aktualisasi seperti kenaikan tingkat, pindah sekolah, atau lulus sekolah setelah digodok oleh operator kabupaten, muncullah data-data peserta didik penerima PKH yang perlu diverifikasi partisipasi pendidikannya.

Diperlukan sebuah form bantu untuk merekap absensi peserta didik dari setiap sekolah madrasah. Jumlah anak didik peserta PKH dari tiap sekolah berbeda-beda. Untuk tingkat Madrasah Aliyah di Kecamatan Gajah sendiri jumlahnya beraneka ragam dengan rincian Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak sebanyak 77 siswa, Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah sebanyak 51 siswa, dan Madrasah Aliyah Tarbiyatul Muftadiin Wilalung Gajah Demak sebanyak 52 siswa. (Rincian data siswa penerima PKH MA se Kecamatan Gajah terlampir).

Inti dari verifikasi pendidikan ini adalah pengecekan absensi peserta didik penerima bantuan PKH selama tiga bulan ke belakang. Jika ternyata ditemukan tingkat kehadirannya kurang dari 85 % maka bantuan yang mereka terima akan ditangguhkan pada tahap berikutnya dengan catatan, pada verifikasi berikutnya tingkat kehadirannya minimal mencapai 85 persen. Poin yang menjadi acuan ketidakhadiran adalah alasan ijin dan alfa. Adapun keterangan sakit, menjadi kemakluman yang tidak dihitung sebagai pengurang kehadiran.

Penangguhan bantuan ini berlangsung selama dua tahap. Jika pada tahap ketiga ditemui non komit kembali, maka secara otomatis mereka dikeluarkan kepesertaannya sebagai anggota PKH dan tidak berhak menerima bantuan lagi. Hal ini merupakan bentuk peringatan bagi mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap PKH. Masih banyak keluarga yang menginginkan menjadi peserta PKH tapi mereka dengan seekanknya menyalahgunakan bantuan dengan tidak memenuhi komitmen pertanggungjawaban sebagai peserta.

Verifikasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah sendiri menunjukkan hal yang positif. Hanya ditemukan beberapa orang saja yang tidak komit dalam pertanggungjawaban PKH. Secara keseluruhan, komitmen peserta didik MA se Kecamatan Gajah ini sangat baik. Rasa tanggung jawab yang mereka emban digunakan dengan baik sehingga sangat menunjang keberhasilan program PKH dalam memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah pada tahun 2017 ini.

Melalui komitmen pendidikan yang baik ini menunjukkan kehadiran peserta didik anggota PKH yang lebih dari 85 % hal ini tidak bisa dipungkiri bisa mempertahankan alokasi pembelajaran mereka selama di madrasah. Seiring dengan banyaknya waktu mereka belajar di madrasah dalam skala minimum mereka akan lebih mempunyai banyak kesempatan untuk belajar pendidikan keislaman.

Hal ini diyakini bisa mendukung kegiatan pemberdayaan pendidikan Islam di MA se Kecamatan Gajah. Alhasil kesadaran mereka terhadap kehadiran di madrasah sangat berimplikasi terhadap pemberdayaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyahnya masing-masing.

Terlepas dari kekhawatiran akan peserta PKH terhadap konsekuensi yang diterima ketika komitmen mereka terhadap PKH tidak dijalankan, hal ini perlu diapresiasi karena secara signifikan pemberdayaan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah cenderung baik. Ada beberapa indikator yang menjadi barometer dalam kaitan antara PKH dengan pemberdayaan pendidikan Islam di MA se Kecamatan Gajah tahun 2017 ini, diantaranya:

- a) Prestasi peserta didik penerima PKH yang di atas rata-rata pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Indikator ini menjadi salah satu hal yang memberikan predikat meningkatnya pemberdayaan pendidikan Islam di MA se Kecamatan Gajah di tahun 2017. Prestasi mereka dalam mata pelajaran PAI cenderung menunjukkan nilai yang memuaskan dan standar kompetensi mereka sudah terlampaui.

Prestasi dalam mapel PAI diyakini menjadi salah satu hal yang menjadikan pendidikan Islam di MA se Kecamatan Gajah mengarah pada langkah yang positif. Penilaian ini menjadi tolak ukur yang menjadikan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif peserta didik secara serta merta dapat digaungkan sehingga pemberdayaan pendidikan Islam di MA se Kecamatan Gajah dapat terealisasi dengan efektif.

- b) Akhlak peserta didik penerima PKH yang terpuji

Karakter merupakan tujuan turunan dari pendidikan yang sekarang menjadi objek *goal* yang laris untuk diunduh. Akhlak peserta didik menunjukkan seberapa khidmad *unggah-ungguh*

yang mereka miliki dalam bergaul dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun dengan orang lain di luar pembelajaran. Akhlak peserta didik penerima PKH tersebut dinilai sopan dan menjadi teladan bagi peserta didik lainnya.

Dengan bantuan sosial yang mereka terima, ada kewajiban yang harus ditunaikan secara moril yakni memiliki sikap terpuji yang bisa menjadi panutan peserta didik lain. Dengan bersikap demikian, orang cenderung berfikir bahwa dirinya memang layak mendapatkan bantuan. Bukan hanya karena ekonominya yang kurang layak, melainkan prestasi dan akhlaknya yang dinilai terpuji.

2) Verifikasi Kesehatan

Hampir sama dengan verifikasi pendidikan, verifikasi kesehatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan verifikasi pendidikan. Bedanya, dalam verifikasi pendidikan membidik ibu hamil dan balita dalam pertanggungjawaban komitmen mereka terhadap pemeriksaan kesehatan rutin minimal sebulan sekali.

Pendamping akan mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di setiap desa; posyandu atau bidan desa untuk memeriksa daftar hadir pemeriksaan kesehatan mereka sehingga dapat diketahui komitmen mereka terhadap PKH khususnya tentang kesehatan keluarga mereka.

Penundaan bantuan tetap akan dipenaltikan ketika kehadiran mereka dalam tahap verifikasi tersebut nihil. Dan bantuan akan diberikan kembali ketika pada verifikasi tahap berikutnya ditemukan kriteria komitmen dalam kehadiran. Tiga kali berturut-turut dalam tiap tahap skala komitmen tidak dilakukan, otomatis kepesertaan PKH mereka akan dianulir untuk selamanya.

b. Verifikasi Kepesertaan

Verifikasi ini bisa dilakukan setiap saat dan tidak terjadwal. Ketika ditemukan sebuah kasus bahwa KPM sudah dalam kehidupan serba berkecukupan, langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi kepesertaan sehingga mereka dievaluasi lagi apakah masih layak menerima bantuan PKH atau tidak. Kemungkinan di lapangan bisa saja terjadi, misalnya usaha yang ditekuni keluarganya meningkat dan merubah ekonomi mereka. Wacana revisi terhadap kepesertaan mereka merupakan sesuatu yang hendaknya dilakukan pendamping.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang belum mendapat bantuan PKH. Masyarakat di luar PKH adalah jritikus ulung yang akan mengikut gerak-gerik PKH dan akan bergerak ketika ditemukan kasus semacam ini. Masyarakat akan menghakimi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah para pendamping PKH. Sebelum mereka *menjustifikasi*, alangkah baiknya pendamping mrngantisipasinya dengan melakukan evaluasi terhadap kasuistik sejenis di atas.

Hal ini terkait erat dengan kesadaran mereka terhadap hakikat dari bantuan PKH dan rasa empati mereka terhadap keluarga kurang mampu lain yang masih perlu dibantu. Ketika kesadaran mereka dalam hal ini tumbuh, secara naluri mereka sudah menjadi peserta PKH sejati yang perlu menjadi teladan dari yang lain. Predikat lulus PKH layak melekat di pundak mereka melalui program graduasi PKH. Kini mereka menyangand predikat sebagai keluarga sejahtera yang menjadi barometer bagi peserta PKH lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Verifikasi kesehatan dan kepesertaan merupakan komplementer yang melengkapi verifikasi pendidikan mengingat domain dari tema besar pemberdayaan pendidikan Islam yang diangkat oleh peneliti. Adapun maksud peneliti memasukkkan kedua domain di atas selain pendidikan yakni untuk memberikan gambaran yang lebih detail

terhadap PKH. Bahwasanya PKH bukan hanya menasar pada ranah pendidikan saja, akan tetapi juga berpijak pada kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

